

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) muncul pertama kalinya di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China di bulan Desember 2019 dan sejak itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Virus ini membawa berbagai dampak yang signifikan di berbagai sektor, seperti merusak rantai pasokan, mengurangi kapasitas produksi, menutup pabrik, dan melarang perjalanan jauh. Imbas dari adanya virus Covid-19 pada sektor industri meliputi sektor pariwisata, manufaktur dan transportasi (Rosita, 2020). Sektor bisnis menjadi salah satu yang terdampak cukup besar akibat pandemi tersebut (Sumarni, 2020). Menurut Unicef (2021), di tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat 2,1%, sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pra-pandemi adalah 5,3%, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan dari hasil bekerja di sawah. Tabel 1 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah telah meningkat menurut provinsi/kota selama periode 2010-2021. Tahun 2019, rasio TPT meningkat dari 4,44 menjadi 6,48 pada tahun 2020.

Tabel 1.
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2021

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Jawa Tengah | 6,21 | 7,07 | 5,61 | 6,01 | 5,68 | 4,99 | 4,57 | 4,47 | 4,44 | 6,48 | 5,95 |

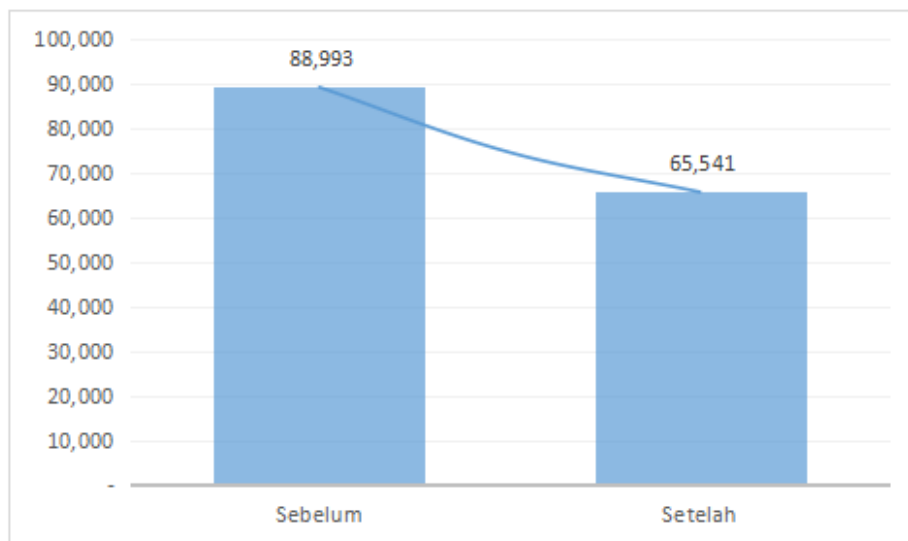
Sumber : jateng.bps.go.id

Rosita (2020) UMKM digambarkan sebagai industri yang bertahan dengan kuat di tengah pandemi yang melanda Indonesia tersebut. UMKM mampu beradaptasi dengan inovasi produk. Selain UMKM, teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu industri yang mampu bertahan. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan dalam penelitian Antara et al. (2020), terdapat

4 (empat) sektor yang terkena imbas dari pandemi Covid-19, diantaranya adalah rumah tangga, UMKM dan bisnis, dan sektor keuangan. Pendapatan UMKM mengalami penurunan yang terjadi dimana dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya yakni akibat adanya penurunan jumlah wisatawan pada sektor pariwisata. (Saidi et al., 2017).

Pandemi COVID-19 mengakibatkan UMKM berjuang untuk mengembalikan stabilitas usahanya, misalnya dengan mendapatkan pendanaan dari bank serta lembaga-lembaga keuangan lainnya. (Cahyono et al., 2021). Pemerintah tentunya perlu mengambil langkah efektif guna menstabilkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha UMKM untuk tetap mampu bertahan di masa pasca Covid-19.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, pekerja yang diberhentikan dengan banyaknya alasan seiring maraknya pandemi Covid-19 di Indonesia mencapai 26%. Angka tersebut tentunya cukup besar, apalagi sebelumnya penyerapan tenaga kerja lokal UMKM cukup besar dan merupakan salah satu faktor dalam ketahanan perekonomian domestic (LIPI.go.id).



Gambar 1.

Data Tenaga Kerja UMKM Sebelum dan Setelah Covid-19

Sumber: dinkop-umkm.jatengprov.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengatur bahwa UMKM adalah usaha perseorangan dan badan yang produktif dan memenuhi kriteria-kriteria usaha mikro. Peran penting dan strategis UMKM dalam membangun perekonomian di Indonesia, karena UMKM memiliki banyak cabang di perekonomian, tingginya potensi lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya, dan kontribusi yang tinggi dari UMKM dalam membentuk PDB. Hal ini membuktikan bahwa UMKM memberi peran penting, yaitu dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi atas pendapatan nasional (Sarfiyah et al., 2019).

Selanjutnya, Sagara et al., (2021) menyebutkan UMKM merupakan solusi atas tingginya pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia. UMKM menawarkan kesempatan pada *home industry* di masing-masing daerah. UMKM memainkan peranan kunci agar tenaga kerja dapat terserap karena hal ini sangat efektif dalam meningkatkan stabilitas nasional. Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran terkait dengan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam dalam kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah tersebut. Gambar 1 menunjukkan tren pertumbuhan turun sebesar -2,65% di tahun 2020 dan meningkat menjadi 3,32% pada tahun 2021.



Gambar 2.

Perkembangan Pertumbuhan (%) PDRB Pengeluaran Jawa Tengah

Sumber : jateng.bps.go.id

Berdasarkan Sugianti & Anwar US (2021), perekonomian Indonesia terkena dampak dari pandemi Covid-19 dimana telah membuat banyak sektor terpuruk diantaranya seperti pada UMKM hingga telah merusak rantai pasokan, penurunan kemampuan produksi, penutupan pabrik, hingga larangan bepergian. Rahmadan et al. (2021) Temuan penelitian menunjukkan hasil penggunaan TIK untuk implementasi digital dalam bentuk modal digital memiliki dampak penting terhadap pendapatan UMKM dan pandemi Covid 19 tidak memberi pengaruh. Namun, upaya mengembangkan digitalisasi UMKM tetap harus didukung oleh peran pemerintah, Kementerian Koperasi serta UMKM, terutama terkait dukungan, bimbingan dan permodalan. Penurunan kapasitas, seperti yang berkaitan dengan produksi hingga penghasilan menuntut pemerintah untuk memberikan kebijakan sebagai upaya melindungi UMKM agar dapat bertahan dan kompetitif meskipun selama pandemi Covid-19 (Amri, 2020).

Menurut McGeever et al. (2020), kebijakan saat Covid-19 memberi pengaruh pada permintaan konsumsi rumah tangga serta kapasitas pasokan perusahaan di beberapa sektor, terutama pada likuiditas penyaluran kredit seperti skema jaminan kredit, program pinjaman langsung dan dukungan fiskal langsung. Masalah yang muncul sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dalam sektor perbankan adalah para debitur, termasuk debitur UMKM dimana mereka kesulitan untuk menjalankan kewajiban kreditnya sehingga mengganggu kinerja perbankan (Disemadi & Shaleh, 2020). Hal ini terkait dengan kualitas SDM yang rendah dan jiwa wirausaha di UMKM. Menurut Soko & Harjanti (2022), Perbankan menjadi salah satu yang merasakan dampak Covid-19 dan salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk menjawab tantangan perekonomian yang ditimbulkan oleh COVID-19. Putri et al. (2019) menjelaskan dimana pengusaha UMKM berbondong-bondong saat mengambil keputusan kredit, terutama saat menawarkan bunga bank.

BPD Jateng adalah bank yang dimiliki oleh Pemprov. Jawa Tengah dan Pemkot/Kab. Jawa Tengah. Bank Jateng memiliki tujuan membantu memperbaiki situasi ekonomi di daerah, dengan cara mengelola keuangan daerah dan memberikan pinjaman kepada pemilik UKM, terutama sebagai pemegang

keuangan daerah. Visi Bank Jateng yaitu menjadi bank terpercaya, kebanggaan bagi masyarakat dan mampu mendukung pembangunan daerah (bankjateng.co.id). Bank Jateng terus mengembangkan bidang usahanya, awalnya bidang usaha utamanya adalah pembiayaan bidang keuangan/kredit. Sebagai bagian dari upaya memperluas bisnis di bidang perkreditan, Bank Jateng menambah unit kerja baru atau unit kerja mikro. Unit kerja mikro Bank Jateng didukung oleh Direktur Dana, Layanan, dan Bisnis UMKM. Hal tersebut berkaitan dengan upaya Bank Jateng Pasca Covid-19.

Sektor perbankan harus memiliki daya tahan baik untuk bertahan agar dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kunci utama yang kini perlu dijaga oleh setiap bank adalah dari segi likuiditas dan penyaluran kredit. Mengingat penekanan program pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga, maka peran perbankan untuk mendorong sektor riil semakin nyata dan krusial (feb.ub.ac.id). Penyaluran kredit UMKM terus dijalankan oleh Bank Jateng terutama pada pasca Pandemi, sebagai bentuk komitmen perusahaan membantu pemerintah menghidupkan kembali perekonomian Jateng. Bank Jateng tentunya juga berupaya mengembangkan dan memberdayakan UMKM dengan mengembangkan ekosistem layanan serta produk bagi UMKM. Bahasan masalah permodalan, masalah manajemen bisnis serta pemasaran fokus pada pinjaman untuk pemangku kepentingan UMKM melalui program pinjaman hingga Rp500.000.000,00 berupa pinjaman berbunga rendah (financial.kontan.co.id). Peran Bank dalam pengembangan UMKM sangat penting, terutama mengenai permodalan dan pembiayaan. UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan, khususnya sektor perbankan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul Peran Bank Daerah dalam Upaya Membangkitkan Ekonomi UMKM Pasca Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Akibat Covid-19, banyak UMKM kesulitan menghimpun dana dari perbankan dan lembaga keuangan yang lainnya (Cahyono et al., 2021). Pinjaman berbunga rendah menjadi pertimbangan masyarakat ketika memilih lembaga

keuangan, namun kenyataannya masyarakat datang dengan biaya transaksi tinggi yang harus dibayar peminjam sebelum atau setelah memperoleh pinjaman. Menurut Lesawati et al. (2019), penilaian prinsip 5C serta analisis laporan keuangan memberi peran penting agar pemberian pinjaman bank dapat efektif, walaupun melalui kemampuan debitur ketika melakukan pembayaran ke pelanggan yang dianggap masih kurang, dimana akan menyebabkan kredit macet meningkat. Kredit macet inilah yang menjadi acuan dalam mengevaluasi tingkat efektivitas kredit yang disalurkan. Hal ini dapat terjadi karena ketidakpastian faktor ekonomi sehingga daya beli masyarakat dan juga penjualan publik menurun. Pemerintah tidak terlibat langsung dan ketergantungan pada jaminan yang disalurkan oleh pemerintah daerah, dimana usaha kecil umumnya tidak dapat dibank, akses ke pembiayaan bank untuk usaha kecil dibatasi, terutama dalam kaitannya dengan persyaratan layanan kredit. UMKM yang telah mendapatkan kredit dari perbankan menunjukkan bahwa kredit sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha, terutama untuk investasi peralatan dan modal usaha, termasuk bangunan komersial. Uyun (2022) mencontohkan, merebaknya Covid-19 di semua negara, termasuk Indonesia, memberi dampak dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pasalnya, perusahaan tersebut terdampak Covid-19 dan banyak karyawan yang harus di-PHK.

Sebelum pandemi, OJK menyebutkan produk pinjaman bank digunakan hingga meningkat sejak Januari 2019 sampai Maret 2020. Rekening kredit UMKM tercatat 16,12juta rekening (33,49%) dari seluruh rekening kredit bank serta meningkat 8,09% dari saldo rekening Maret 2019 sebesar 14,91 juta rekening. Namun, semenjak pandemi merebak di Indonesia, jumlah rekening kredit UMKM turun signifikan atau 4,20% dari 16,12 juta rekening pada Juli 2020 menjadi sekitar 15,44 juta rekening (ojk.go.id). Data Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan dimana kredit bank umum untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 1.102,66 triliun pada Juli 2021. Nilai tersebut turun 0,45% dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp 1.107,59 triliun (databoks.katadata.co.id). Pemerintah harus mengambil tindakan berupa tindakan dan langkah yang dianggap paling tepat dan cara yang efektif untuk menjaga

stabilitas situasi ekonomi Indonesia. Hal itu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi untuk tetap bertahan di tengah masa pandemi Covid-19.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM Pasca Covid-19?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM Pasca Covid-19?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM pada masa Covid-19.
2. Menilai hambatan apa saja yang dihadapi Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM pada masa Covid-19

1.5. Motivasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat membantu mahasiswa mengimplementasikan ilmu Perekonomian Indonesia yang telah dipelajari selama perkuliahan berupa upaya yang dilakukan oleh Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM pada masa Covid-19. Selain itu, penelitian ini penting bagi Bank Daerah dalam meningkatkan upaya yang dilakukan oleh Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM terutama dalam hal penyaluran kredit.

1.6. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk Bank Daerah dalam upaya yang dilakukan oleh Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM pada masa Covid-19.

2. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan ilmu manajemen serta diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan, terutama pada aspek berupa upaya yang dilakukan oleh Bank Daerah untuk membangkitkan ekonomi UMKM pada masa Covid-19.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Ketahanan Ekonomi (Economic Resilience)

Rose (2004) mendefinisikan ketahanan ekonomi (*economic resilience*) mengacu pada tanggapan yang melekat dan adaptif terhadap bencana yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk menghindari beberapa potensi kerugian. Ini dapat terjadi di tingkat perusahaan, rumah tangga, pasar, atau ekonomi makro. Berbeda dengan karakter mitigasi sebelum peristiwa, ketahanan ekonomi menekankan kecerdikan dan akal yang diterapkan selama dan setelah peristiwa. Hal ini berfokus pada fakta bahwa individu dan organisasi tidak hanya bereaksi secara pasif atau dalam "cara bisnis seperti biasa" dalam menghadapi bencana. Pertama, mendefinisikan beberapa dimensi penting ketahanan ekonomi terhadap bencana. Kedua, menunjukkan bagaimana pemodelan ekuilibrium umum yang dapat dihitung mewakili kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis perilaku individu, bisnis, dan pasar. Ketiga, merangkum kemajuan terkini dalam pemodelan ketahanan konseptual dan empiris, termasuk penggabungan disequilibrium dan kalibrasi ulang parameter perilaku utama berdasarkan analisis empiris. data. Keempat, menggunakan hasil studi kasus untuk mengilustrasikan beberapa isu penting yang berkaitan dengan subjek.

National Association of Counties (NACO), (2013) menggambarkan ketahanan ekonomi sebagai kemampuan masyarakat untuk meramalkan, beradaptasi, dan memanfaatkan perubahan kondisi untuk keuntungan mereka. Demikian pula, Panduan Konten Strategi Pembangunan Ekonomi Komprehensif (CEDS) Administrasi Pembangunan Ekonomi AS (EDA, 2016) mencatat bahwa ketahanan memiliki tiga atribut utama yaitu kemampuan untuk pulih dengan cepat dari shock, kemampuan menahan guncangan; dan kemampuan untuk menghindari kejutan sama sekali. Guncangan dapat berupa kemerosotan ekonomi nasional atau global yang berdampak pada permintaan barang dan belanja lokal, kemerosotan industri tertentu yang penting bagi kegiatan ekonomi lokal; dan dampak eksternal seperti bencana alam atau buatan manusia, penutupan pangkalan militer atau

majikan besar, perubahan iklim, dll. Masyarakat harus bersiap karena guncangan ekonomi selalu menunggu di depan mata. Karena guncangan tidak dapat dihindari, seperti dicatat oleh EDA, kemakmuran ekonomi jangka panjang suatu kawasan terkait dengan kemampuannya untuk mengatasi gangguan pada basis ekonominya. Pengembang ekonomi berperan penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan peran mereka dari perspektif sebelum dan sesudah insiden. Beberapa upaya perencanaan komprehensif dalam inisiatif kondisi mapan (*Steady-state Initiatives*) seperti:

1. Melaksanakan upaya diversifikasi basis industri;
2. Menyesuaikan program retensi bisnis untuk membantu perusahaan dalam pemulihan setelah terjadi guncangan;
3. Mengembangkan tenaga kerja yang dapat beralih antara pekerjaan dan industri;
4. Menggunakan sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan data pendirian bisnis dan lokasi pengembangan yang tersedia, terintegrasi dengan informasi bahaya untuk memungkinkan penilaian dampak pasca-insiden yang cepat;
5. Memastikan redundansi dalam jaringan komunikasi untuk melindungi perdagangan dan keamanan publik;
6. Mempromosikan kesinambungan bisnis dengan memastikan bisnis memahami kerentanan mereka, seperti rantai pasokan mereka, dalam menghadapi gangguan; dan
7. Menerapkan praktik pembangunan yang aman, seperti menempatkan struktur di luar dataran banjir, menjaga tanah alami sebagai penyangga, dan melindungi pembangunan yang ada dari cuaca ekstrem.

Inisiatif Responsif merupakan inisiatif pasca-insiden yang berfokus pada kemampuan komunitas untuk bereaksi dalam jangka pendek terhadap guncangan dan kebutuhan pemulihan. Beberapa contoh termasuk:

1. Perencanaan pemulihan prabencana yang mendefinisikan pemangku kepentingan utama, peran, tanggung jawab, dan tindakan;
2. Mengembangkan sistem komunikasi, pemantauan, dan pemutakhiran

kebutuhan komunitas bisnis secara berkala untuk digunakan setelah atau selama insiden;

3. Menetapkan kemampuan untuk menghubungi pejabat kunci dengan cepat (lokal, regional, negara bagian, dan federal) untuk menghubungkan kebutuhan sektor bisnis dan penilaian dampak; dan
4. Membuat mekanisme koordinasi dan rencana suksesi kepemimpinan untuk kebutuhan pemulihan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Ketahanan ekonomi biasanya digunakan dalam dua cara yang berbeda, tetapi tumpang tindih. Pada satu tingkat dapat didefinisikan secara luas sebagai kemampuan ekonomi secara keseluruhan untuk mengatasi, pulih dari dan merekonstruksi setelah shock (Hallegatte, 2014). Pada saat yang sama, ini sering digunakan untuk merujuk pada kemampuan keuangan rumah tangga atau bisnis individu dan kemampuan mereka untuk bertahan atau pulih dari gangguan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dalam perekonomian yang lebih luas. Dalam hal ini, dapat berupa efek distribusi dari guncangan (siapa yang terkena dampak dan bagaimana) serta kerentanan individu terhadap gangguan dan sifat pengaturan kesejahteraan yang ada. Kedua konsep ini terkait. berhubungan karena saling bergantung dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Inti dari cara berpikir ini adalah gagasan bahwa ketahanan adalah tentang meminimalkan (total) kehilangan kesejahteraan. Semakin tinggi ketahanan keuangan, semakin rendah kerugian keuangan dari guncangan periodik. Konsep alternatifnya adalah memikirkan bagaimana ketahanan dapat meningkatkan tunjangan kesejahteraan. Konsep ini mendasari banyak gagasan dalam ekonomi pembangunan, yang secara luas mengklaim bahwa memperkuat sumber daya keuangan individu dan masyarakat meningkatkan ketahanan mereka terhadap guncangan ekonomi.

Konsep ketahanan ekonomi mencakup dua komponen kunci. Yang pertama adalah kemampuan ekonomi rumah tangga, perusahaan atau ekonomi untuk menahan atau menyerap guncangan ekonomi. Yang kedua adalah komponen yang lebih dinamis yang berkaitan dengan kemampuan rumah tangga, perusahaan atau perekonomian secara lebih luas, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah dan memperkuat kemampuan mereka untuk menanggapi potensi

guncangan di masa depan. Sementara sebagian besar pemahaman kita tentang ketahanan ekonomi berfokus pada sifat aset (termasuk modal keuangan, fisik, dan sosial) yang tersedia bagi individu, perusahaan, atau lintas ekonomi secara keseluruhan, terdapat pengakuan yang semakin meningkat atas peran pilihan (dan lingkup untuk membuat dan bertindak atas pilihan) sebagai pengaruh pada hasil ketahanan.

Hantaman dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi nasional kini sedang berlangsung dan kita belum bisa memastikan sampai seberapa dalam dampak yang terjadi. Laju ekonomi kuartal I 2020 tercatat 2,97% atau terkontraksi 2,41% dibanding kuartal IV 2019. Bahkan, pada kuartal II kontraksi ekonomi makin dalam hingga minus 5,32%. Penurunan ekonomi selama pandemi terjadi karena banyak aktivitas ekonomi, terutama perdagangan, pariwisata yang tersendat. Kerapuhan sektor riil yang terjadi saat ini, perlu diantisipasi dengan baik, terutama kebijakan yang sifatnya protektif dan stimulatif untuk mencegah perembetan pada sektor lain terutama sektor keuangan dan perbankan (feb.ub.ac.id).

Hantaman terhadap sektor perbankan sebenarnya telah terjadi di beberapa negara di ASEAN jika dilihat capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah dimana hal tersebut mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit dan berujung pada penurunan profitabilitas industri perbankan. Fitch Ratings menilai, bank-bank di Thailand dan Singapura yang bergantung pada pariwisata, merupakan sektor yang paling terpengaruh oleh Covid-19. Ketergantungan Thailand pada pariwisata berimbas pada sektor UKM yang menyumbang 33% portofolio kredit perbankan. Selain itu, sektor perbankan di Vietnam juga mengalami keterpurukan akibat berkurangnya pemasukan dari sektor pariwisata, terganggunya rantai pasok manufaktur serta melemahnya permintaan ekspor yang pada akhirnya membebani kualitas aset perbankan di Vietnam. Disisi lain, perbankan di Singapura juga telah terdampak Covid-19 lantaran 24% kredit mereka mengalir ke berbagai perusahaan asal China yang juga sedang mengalami gangguan pandemi (bankjateng.co.id).

Perbankan merupakan jantung bagi kelancaran aliran darah aktivitas ekonomi di suatu perekonomian. Perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis, salah

satunya sebagai lembaga intermediasi aliran dana dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat sangat penting untuk dijaga guna meningkatkan efisiensi intermediasi serta mencegah terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat terhadap bank juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Pandemi yang tak kunjung usai telah membawa lembaga Pemeringkat Internasional, Moody's Investors Service menurunkan outlook perbankan nasional dari stabil menjadi negatif untuk 12-18 bulan ke depan. Hal itu seiring kondisi ekonomi yang kian melemah. Tim analis Moody's menyatakan kualitas kredit akan menurun meski restrukturisasi dan penurunan suku bunga kredit bisa memberikan sedikit dukungan. Meski demikian, tebalnya permodalan dapat menjadi penawar untuk menghadapi risiko yang meningkat saat ini.

Selama tiga tahun belakangan, rasio kecukupan modal alias CAR perbankan memang tercatat stabil di atas 20%, lebih besar dibandingkan kondisi saat krisis global 2008 yang di kisaran 16-17%. Per Januari 2020, CAR nyaris mencapai 23%. Meski demikian, tekanan pada profitabilitas perbankan akan sulit dihindari. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan laba perbankan hingga akhir tahun akan menyusut sekitar 30% – 40% dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan keuntungan perbankan telah terlihat pada kuartal II 2020. Sepanjang April hingga Juni 2020, laba bank sebelum pajak tercatat turun 19,8% dari tahun lalu.

Anjloknya keuntungan tersebut lantaran banyaknya restrukturisasi kredit akibat Covid-19. Berdasarkan data OJK, tingkat kredit macet perbankan mengalami kenaikan 3,22%. Angka tersebut naik dari posisi Juni yang mencapai 3,1%. Meski terjadi penurunan laba dan peningkatan kredit macet, namun data OJK menunjukkan bahwa likuiditas perbankan Indonesia cukup memadai untuk dapat menyalurkan kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi. OJK mencatat hingga Agustus 2020, total Alat Likuid (AL) perbankan mencapai Rp1.913 triliun. Artinya, hingga saat ini sektor jasa keuangan di Indonesia masih memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi permodalan maupun likuiditas, untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi dari

pemerintah.

Di balik ketahanan sektor perbankan secara umum di Indonesia, namun sejatinya tidak semua bank memiliki ketahanan yang sama di tengah wabah Covid-19. Ketahanan individu internal bank dengan aset kecil dan tidak sistemik, serta bank dengan tata kelola yang buruk akan rentan rapuh dalam menghadapi situasi saat ini. Pada sisi modal, bank dengan aset terbatas tidak memiliki permodalan yang besar, sementara dari rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) bank kecil hanya berpusat pada beberapa deposan. Akibatnya, risiko likuiditas tersebut terjadi karena adanya penurunan rasio DPK dan cash inflow pada individu bank, di mana risiko likuiditas tersebut dapat meningkat selama masa pandemi. Ancaman Covid-19 terhadap likuiditas bank juga rentan bagi bank yang memiliki tata kelola yang buruk. *Good Corporate Governance* yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*) tersebut kini di masa pandemi mampu memperkuat ketahanan kondisi internal Bank dalam menghadapi lesunya ekonomi nasional.

2.2. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan bagian dari perbankan nasional. Bank Pembangunan Daerah ini berperan dalam mendukung pembangunan daerah dari sisi pembiayaan, sehingga perlu memberikan kinerja efisiensi yang optimal. Menurut UU No 13 Tahun 1962, BPD adalah bank yang berdiri di daerah otonom Tingkat I, yang berperan dalam penyediaan dana di daerah dalam rangka pembangunan nasional. Berdasarkan Surat Persetujuan Pemerintah Umum dan Pemerintah Daerah tertanggal 13 Maret Tahun 1963 Nomor DU 57/1/35, BPD Jawa Tengah didirikan di Semarang dan mulai beroperasi pada tanggal 6 April 1963 sesuai dengan izin usaha Nomor 4/Kep/MUBS/63.

BPD Jawa Tengah memiliki tujuan dalam peningkatan perekonomian dengan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan kredit kepada para pemilik usaha kecil dan menengah. Sebagai bank milik pemerintah, BPD Jawa Tengah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk badan usahanya. Awalnya, sesuai dengan

perda provinsi Jawa Tengah Nomor 1969 tanggal 03 Maret Tahun 1969, BPD Jawa Tengah ditetapkan sebagai BUMD. Kemudian, status ini berubah pada tahun 1993, di mana status BPD Jateng menjadi Perusahaan Daerah. Pada tahun 1999, BPD Jawa Tengah kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas dan mengikuti program rekapitalisasi perbankan. Selanjutnya, setelah selesai dengan program rekapitalisasinya dan seiring dengan perkembangan perusahaan, untuk menampilkan citra baru perusahaan, manajemen melakukan perubahan logo dan nama perusahaan menjadi Bank Jateng. Hal ini sesuai dengan Keputusan Perubahan Nomor 68 Tanggal 07 Mei Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C.17331 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 22 Juni Tahun 2005.

2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu unit usaha dengan produksi yang berbeda pada setiap sektor ekonomi yang ada. Perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah mengacu pada aset awal yang dimiliki oleh usaha tersebut, pendapatan/omset tahunan, dan jumlah karyawan yang dimilikinya. Namun, adanya perbedaan dari ketiga alat ukur tersebut di setiap negara, menjadikan kesulitan dalam melakukan perbandingan peranan dan pentingnya UMKM di lintas negara (Tambunan, 2020).

Di Indonesia sendiri, pengertian UMKM tercantum dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 yang menyatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perseorangan dana satu badan yang memenuhi ketentuan undang-undang. Usaha kecil merupakan usaha perseorangan atau badan yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan atau unit usaha, dimiliki dan dikuasai secara langsung ataupun tidak langsung, serta telah sesuai dengan kriteria hukum untuk usaha kecil. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau bagian dari usaha kecil, menengah, atau sangat besar, tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang merupakan divisinya.

Menurut UU UMKM No 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha yang kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp50.000.000,00 atau omset tahunannya tidak

lebih dari dari Rp300.000.000,00. Usaha kecil usaha yang memiliki aset mulai dari Rp50.000.000,00 hingga Rp500 juta atau omset tahunan berkisar Rp300.000.000,00 hingga Rp2,5 miliar. Usaha menengah merupakan usaha dengan aset antara Rp500.000.000,00 dan Rp10.000.000.000,00 atau mempunyai omset tahunan antara Rp2,5miliar hingga Rp50miliar. UMKM ini memainkan peranan penting dalam membangun dan menumbuhkan perekonomian di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini disebabkan karena UMKM lebih berkontribusi besar dalam membentuk dan menumbuhkan PDB dibandingkan dengan perusahaan besar. Pasalnya, kelompok pada usaha UMKM selain melakukan mayoritas pekerjaan dibandingkan perusahaan besar, juga turut berkontribusi lebih banyak dalam membentuk dan menumbuhkan produk domestik bruto. Dari sisi kontribusi UMKM pada PDB berdasarkan sektor, ditemukan bahwa, kontribusi terbesar untuk UMKM berada pada sektor PPKP dengan 49,58% untuk unit UMKM dan 29,56% untuk sektor PHR. Industri dari kedua bidang ini memiliki potensi untuk berkembang dari industri mikro dan berkembang menjadi industri besar. Banyaknya kendala yang cukup bervariasi menjadi salah satu masalah yang terjadi. Hambatan ini bervariasi menurut wilayah, antara daerah pedesaan dan perkotaan, antar sektor, atau antar perusahaan dalam industri yang sama.

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh Bank Daerah dalam membangkitkan ekonomi UMKM Pasca Covid-19 yang dijadikan referensi dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|
| 1 | Hafizd (2020) DOI: https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402 | Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa | Hasil penelitian menyatakan bahwa dampak pandemi terjadi pada berbagai sektor seperti investasi, perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Bisnis pialang BSM meningkat dan mampu |

| No | Nama dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| | | Pandemi COVID-19. | menghasilkan keuntungan. Hal ini tentunya memiliki dampak positif pada perdagangan digital BSM sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengguna Mandiri Syariah Mobile, meningkatnya transaksi digital, dan juga meningkatnya nasabah yang membuka rekening secara online. Peran BSM pada masa Covid-19 terdiri dari penataan keuangan nasabah, dukungan sosial, maksimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penerapan protokol kesehatan, dan pengalihan operasional perbankan ke basis digital. |
| 2 | Muttaqin et al., (2020) DOI: https://doi.org/10.47467/elmal.v2i1.393 | Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. | Responden meyakini bahwa bank syariah memiliki peran penting untuk mendorong UMKM di masa pandemi dengan mendukung program pemerintah yaitu penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat). Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan kelonggaran dalam kredit kepada pengusaha yang usahanya terkena dampak dari pandemi Covid-19 dan memperlancar proses pembiayaan kewirausahaan yang ditetapkan pemerintah melalui Surat Perintah PJOK Nomor 11 Tahun 2020. |
| 3 | Cahyono et al. (2021) DOI: http://dx.doi.org/10.29300/aij.v7i2.4761 | Peran Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. | Hasil survei menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) didukung oleh Zakat, Infak dan shadaqah. Selain dukungan modal usaha utama untuk sektor korporasi atau untuk UMKM (UMKM), juga dukungan dari pemerintah bagi UMKM yang sudah memperoleh izin usaha dari desa, program Qardhul Hasand Perbankan Syariah dan pinjaman usaha yang ada di. Selama ini dana sosial untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dimiliki oleh perbankan syariah belum efektif karena masyarakat banyak menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. |
| 4 | Handayani et al. (2021) | PERAN BANK INDONESIA DALAM | Hasil dari penelitian ini adalah Bank Indonesia bertindak sebagai “lender of resort” dengan memberikan bantuan |

| No | Nama dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|
| | DOI: https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4515 | MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 | likuiditas dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk menyelamatkan sistem perbankan. Terkait dengan pelaksanaan Government Agreement Program, Bank Indonesia harus ikut serta sebagai bank peminjam dalam menyelesaikan krisis keuangan yang dialami sektor korporasi yang bukan <i>best practice</i> . Bank Indonesia berperan aktif dalam mempersiapkan pembentukan LPS, pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan Internal dan Internasional. |
| 5 | Ritonga & Sinaga (2021) DOI: http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i2.10007 | Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). | Dari kajian ini, Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Medan juga telah menyalurkan program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong UMKM pada masa pandemi Covid-19 untuk membantu nasabah yang sebelumnya melakukan penarikan untuk mempermudah Atau membantu menerima dana dari pandemi melalui pemberian relaksasi atau keringanan membayar angsuran. |
| 6 | Flögel & Hejnová (2022) DOI: 10.2139/ssrn.4001763 | The Effects of Regional Banks on Economic Resilience during the COVID-19 Pandemic and the Global Financial Crisis A Cross-Country Comparison of the European Countries | Temuan menunjukkan bahwa dampak desentralisasi berbeda antara dua krisis: sementara penyebaran yang lebih besar dari bank daerah dikaitkan dengan ekonomi ketahanan selama GFC, negara-negara dengan sistem perbankan yang lebih terpusat berkinerja lebih baik di tahun pertama pandemi. Studi selanjutnya tentang jalur pemulihan pandemi akan menunjukkan jika bank daerah memilikinya kehilangan kemampuan mereka untuk pendanaan countercyclical, atau jika krisis non-keuangan ini membuat struktur keuangan menjadi kurang penting. |
| 7 | Sharma (2022) DOI: 10.1177/02560909221078460 | Implications of Policy Initiatives for MSMES amid Economic Disruptions Caused by COVID-19 | Terdapat kebutuhan untuk merancang lebih banyak skema khusus untuk mendukung usaha mikro. Karena prakarsa dan langkah-langkah yang diumumkan oleh pemerintah dan RBI memiliki ruang lingkup yang terbatas untuk mendukung sektor UMKM, |

| No | Nama dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|------------------|--|
| | | | <p>mengingat tingkat informalitas yang tinggi, ada kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk menghidupkan kembali usaha kecil, khususnya usaha mikro yang beragam. Kebijakan nasional yang luas mungkin tidak menjawab keprihatinan mereka. Sebaliknya, tindakan pemerintah yang dirancang setelah berkonsultasi dengan asosiasi bisnis lokal dapat menguntungkan perusahaan lokal.</p> |

Sumber: Berbagai Jurnal Acuan, 2022

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Konteks Riset

Penelitian ini dilakukan terbatas pada upaya yang dilakukan oleh Bank Daerah, Bank Jateng, untuk membangkitkan perekonomian UMKM pasca Covid-19 serta menilai hambatan-hambatan yang dihadapi pada implementasi upaya yang dilakukan oleh Bank Jateng. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangkitkan perekonomian UMKM khususnya di wilayah Jawa Tengah pasca Covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada Bank Jateng dalam upayanya untuk membangkitkan ekonomi UMKM Pasca Covid-19 sehingga kedepannya dapat dilakukan evaluasi atas upaya tersebut.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya (Luthfiyah, 2020). Mengacu pada pendekatan yang hanya kepentingan tertentu, menurut Atmowardoyo (2018), karena fenomena yang diamati dalam studi deskriptif sudah tersedia, yang perlu dilakukan peneliti hanyalah menganalisis data yang tersedia dengan menggunakan alat penelitian seperti tes, angket, wawancara, bahkan observasi serta fenomena yang sedang dipelajari.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung berasal dari sumber asli. Penggunaan data primer pada umumnya harus memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga informasi yang didapatkan berguna untuk pengambilan keputusan. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan langsung dari Bank Jateng yang disurvei melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan yang diperoleh dalam bentuk lengkap, data yang dikurasi dalam arsip, atau data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Hasanah (2017), observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah eksperiensial berdasarkan fakta dan teks di lapangan dan mengalami panca indera tanpa manipulasi. Observasi dilakukan dengan mengamati fenomena yang terjadi di UMKM terkait dampak Pengaruh Covid-19 dan peran yang dilakukan oleh Bank Jateng serta membandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan.

2. Wawancara

Menurut I Komang Setia Buana (2020), wawancara merupakan kegiatan komunikatif melalui proses pertukaran informasi antara seorang reporter dengan sumber informasi. Wawancara memberikan informasi penting untuk reduksi data, penyajian data, dan analisis data menggunakan diagram

kesimpulan untuk menguraikan kesimpulan tentang data penelitian menggunakan literatur dan triangulasi sumber data yang dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan mendengarkan dan merekam hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang upaya bank daerah untuk merevitalisasi ekonomi mikro, kecil dan menengah setelah infeksi virus corona baru. Wawancara dilakukan dengan tiga karyawan Bank Jateng yang memahami dan berkaitan langsung dengan pelaku UMKM dan beberapa nasabah UMKM untuk mengetahui bagaimana upaya tersebut berdampak pada UMKM. Wawancara kepada Personil Bank Jateng dilakukan kepada Ibu Fima Martanita selaku Kanit Pemasaran, Bapak Tomy Firmawan selaku Unit Head dan Bapak Haryadi selaku Analis Kredit Mikro. Wawancara kepada Nasabah UMKM dilakukan kepada Bapak Slamet selaku UMKM Produksi Roster, Ibu Meirawati selaku UMKM Toko Sembako dan Bapak Antero selaku UMKM Toko Kain.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan dari kejadian masa lalu dan bisa berbentuk teks, gambar, maupun karya monumental yang diteliti. Dokumen digunakan dalam penelitian ini adalah profil organisasi, laporan kegiatan, aturan, kebijakan, SOP, gambar, memo dan dokumen lain serta dokumen lain terkait pengendalian mutu sumber daya manusia pada Bank Jateng.

3.5. Teknik Analisis Data

Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Memahami profil Bank Jateng seperti struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tujuan, dll.
2. Memahami kondisi di lapangan. Tahapan ini dilakukan meliputi wawancara awal, tour area Bank Jateng, mempelajari file dokumen seperti laporan keuangan, SOP kegiatan, catatan dan bukti lain.
3. Melakukan wawancara dengan cara menyimak serta mencatat informasi penting dengan orang kunci (key person).

4. Melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk datanya menggunakan triangulasi sumber data
5. Melakukan evaluasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumen serta menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.